

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rasyid Thalib, 2006, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Achmad Ali, 2002, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis), PT. Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta.

Adami Chazawi, 2011, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang, Yogyakarta

Amiruddin, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ateng Syafrudin, 2000, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab", Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung.

Bambang Triatmodjo, 2009, Perencanaan Pelabuhan, Beta Offset, Yogyakarta.

Erdianto Efendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung.

Hartono, 2012, Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta.

Herman Budi Sasono, 2012, Manajemen Pelabuhan dan Realisasi Ekspor Impor, Andi, Yogyakarta.

[Http://ilmupengetahuanumum.com/10-negara-dengan-garis-pantai-terpanjang-di-dunia](http://ilmupengetahuanumum.com/10-negara-dengan-garis-pantai-terpanjang-di-dunia), Diakses tanggal 24 maret 2021 pada pukul 15:00 WITA.

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Lilik Mulyadi, 2007, Hukum Acara Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Lilik Mulyadi, 2007, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya, Citra Aditya Bakti, Bandung.

M. Yahya Harahap, 2003, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta.

Marzuki, 1983, Metodologi Riset, PT. Hanindita Offset, Yogyakarta.

Mohammad Ekaputra, 2015, Dasar-Dasar Hukum Pidana, USU Press, Medan.

Muhammad Rusli, 2007, Hukum Acara Pidana Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Nunung Mahmudah, 2015, Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Nur Yanto, 2014, Memahami Hukum Laut Indonesia, Mitra Wacana Media, Jakarta.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 Tentang Kepelabuhanan.

Putusan Nomor 159/PidSus/2020/PN.Tpg.

Randy Y.C Aguw, 2013, "Tanggung Jawab Syahbandar Dalam Keselamatan Pelayaran Dirinjau Dari Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran", Jurnal Lex Administratum, Vol. 1, No. 1.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2012, Pengantar Penelitian Hukum, cetakan ketiga, UI Press, Jakarta.

Surat Keputusan Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut Indonesia. Nomor: SKEP068/KALAKHAR/BAKORKAMLA/XI/2010.

Teguh Prasetyo, 2014, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Wirjono Projodikoro, 1983, Hukum Dagang, Hukum Pelayaran Laut dan Pelayaran Darat, Bandung.

Zainal Assikin, 2013, Hukum Dagang, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.